

**PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP KEMISKINAN: KOMPARASI
KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
PROVINSI BENGKULU**



Skripsi Oleh:

AISYARAHMA CLEO AMANDA

01021382126158

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

**PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP KEMISKINAN: KOMPARASI
KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN
PROVINSI BENGKULU**



Skripsi Oleh:

AI SYARAHMA CLEO AMANDA

01021382126158

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

“PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) TERHADAP KEMISKINAN: KOMPARASI KAB/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BENGKULU”

Disusun Oleh :

Nama : Aisyarahma Cleo Amanda

NIM : 01021382126158

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal : 15 Mei 2025


Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP KEMISKINAN: KOMPARASI KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BENGKULU

Disusun Oleh:

Nama : Aisyarahma Cleo Amanda
Nim : 01021382126158
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

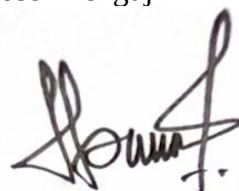
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 19 Juni 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing

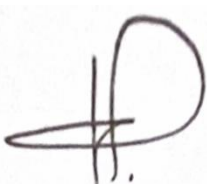

Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

Dosen Penguji


Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP. 199004072018032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 8-7-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI


Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aisyarahma Cleo Amanda

NIM : 01021382126158

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan: Komparasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu

Pembimbing : Dr. Sukanto, S.E., M.Si

Tanggal Ujian : 19 Juni 2025

Adalah benar hasil karya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya, demikianlah pernyataan ini saya buat sebelumnya dan apabila pernyataan saya buat sebelumnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 7 Juli 2025

Pembuat pernyataan,



Aisyarahma Cleo Amanda

NIM. 01021382126158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“It will pass, everything you've gone through it will pass.”

(Rachel Vennya)

“It's fine to fake it till you make it, until you do, until it's true.”

(Taylor Swift)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things, all grudges, all updates on your ex, all enviable promotions your school bully got at the bedge fund his uncle started. Decide what is yours to hold and let the rest go.”

(Taylor Swift)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Allah Swt
- Papa dan Mama
- Saudaraku
- Teman-temanku
- Almamater

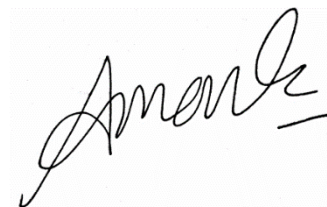
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kemiskinan: Komparasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu "*** dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 7 Juli 2025

Penulis,



Aisyarahma Cleo Amanda

NIM. 01021382126158

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** dengan segala Rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Kedua orang tua tersayang, **Papa Hardiyanto dan Mama Oke Saraswati** yang telah memberikan doa, cinta, material serta menjadi sumber semangat terbesar dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih sudah selalu mendoakan dan mendampingi setiap keadaan demi kelancaran pendidikan penulis. Setiap langkah yang saya ambil, setiap keberhasilan yang saya raih adalah buah dari doa dan pengorbanan kalian yang tak ternilai.
3. Saudara **Andien Putri Humairah dan Chelsea Putri Yasmin** selaku adik penulis yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
4. **Bapak Dr. Sukanto, S.E., M.Si** selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu, ilmu, arahan serta kritik yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan segala kebaikan serta kesabaran yang telah Bapak curahkan menjadi amal jariyah dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

5. **Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam menyusun skripsi yang lebih baik dan berpikir lebih kritis.
6. **Ibu Liliana, S.E., M.Si** selaku dosen pembimbing akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan serta saran bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis menjalankan perkuliahan.
8. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Terima kasih kepada **M. Naufal Putrareva** yang selalu ada dalam setiap keadaan penulis. Terima kasih telah memberikan semangat, meluangkan waktu, mendengar keluh kesah dan membantu penulis di belakang layar selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk **Smart Ladies and Boy (Adelia Khairun Nisa, M. Vicky Riandi dan Dinar Azzahra)** yang telah menjadi tempat berbagi cerita, bertukar pikiran, dan tawa selama masa perkuliahan.
11. Terima kasih kepada teman bermain selama masa perkuliahan penulis, **Intan Aditya Ningrum, Junifer Tamin, Clara Dwi Purnama, Larasati, Rara Putri Pangestika, Ananda Aprilivia dan Jesen** yang telah memberikan kenangan baik dan tidak terlupakan selama masa perkuliahan.
12. Terima kasih kepada Aisyarahma Cleo Amanda selaku penulis yang telah berjuang dan bertahan selama proses skripsi ini. Perjalanan dalam menyusun

skripsi ini tidaklah mudah. Di dalamnya tersimpan banyak cerita—suka dan duka, semangat dan kelelahan, harapan dan keraguan. Namun, semua itu menjadi pengalaman yang tak ternilai dan bagian penting dari proses. Semoga segala perjuangan, pengorbanan, serta pelajaran dari setiap langkah ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat.

ABSTRAK

PENGARUH DANA BAGI HASIL (DBH) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP KEMISKINAN: KOMPARASI KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BENGKULU

Oleh:

Aisyarahma Cleo Amanda; Sukanto; Feny Marissa

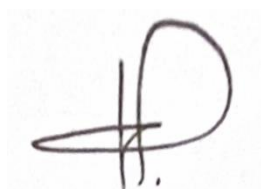
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu selama periode 2018–2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel menggunakan model Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu DBH dan DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana transfer pusat berbeda-beda di tiap daerah, bergantung pada karakteristik wilayah, kapasitas fiskal, dan pengelolaan anggaran daerah. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan fiskal daerah agar penyaluran DBH dan DAK lebih optimal dalam mendukung penurunan angka kemiskinan.

Kata kunci: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Kemiskinan.

Mengetahui

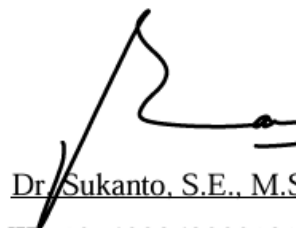
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



Dr. Sukanto, S.E., M.Si

NIP. 197403252009121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF REVENUE SHARING FUNDS (RSF) AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS (SAF) ON POVERTY: A COMPARISON OF REGENCIES/CITIES IN SOUTH SUMATRA AND BENGKULU PROVINCES

Written By:

Aisyarahma Cleo Amanda; Sukanto; Feny Marissa

This study aims to analyze the effect of Revenue Sharing Funds (RSF) and Special Allocation Funds (SAF) on the poverty rate in the districts/cities of South Sumatra and Bengkulu Provinces during the period of 2018–2022. The method used is a quantitative approach with panel data regression analysis techniques using the Fixed Effect Model (FEM), selected based on the results of the Chow and Hausman tests. The data used are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance. The results show that in both South Sumatra and Bengkulu Provinces, RSF and SAF have a negative and significant effect on poverty. These findings indicate that the effectiveness of central government transfer funds varies across regions, depending on regional characteristics, fiscal capacity, and budget management. This study provides important implications for regional fiscal policy formulation to ensure that the distribution of RSF and SAF can be optimized to support poverty reduction efforts.

Keywords: Revenue Sharing Funds, Special Allocation Funds, Poverty.

Knowing

Head of Economic Development



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

Adviser



Dr. Sukanto, S.E., M.Si

NIP. 197403252009121001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Aisyarahma Cleo Amanda

NIM : 01021382126158

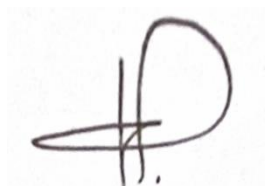
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Mata Kuliah : Keuangan Daerah

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Bagi Hasil (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kemiskinan: Komparasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.

Telah kami periksa secara penulisan, grammar, maupun susunan tensesnya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Pembimbing



Dr. Sukanto, S.E., M.Si
NIP. 197403252009121001

RIWAYAT HIDUP

	Nama	Aisyarahma Cleo Amanda
	NIM	01021382126158
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 17 Agustus 2004
	Alamat	Jl. Harapan Jaya 1 Lr. Letari No. 107 Rt. 37 Rw. 07
	Nomor Handphone	081770426669
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi Badan	155 cm	
Berat Badan	47 kg	
Email	aisyaamanda17@gmail.com	
RIWAYAT PENDIDIKAN		
2009-2015	SD Negeri 65 Palembang	
2015-2018	SMP Negeri 08 Palembang	
2018-2021	SMA Negeri 05 Palembang	
2021-2025	Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI		
2018-2019	Bujang Gadis SMA Negeri 05 Palembang	
2022-2023	Staff Muda Kerohanian dan Sosling IMEPA FE UNSRI	
2023-2024	Staff Ahli HRD IMEPA FE UNSRI	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Kemiskinan.....	13
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	14
2.1.3 Kemiskinan	15
2.1.4 Dana Bagi Hasil	17
2.1.5 Dana Alokasi Khusus	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	21

2.4	Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN		24
3.1	Ruang Lingkup Penelitian	24
3.2	Jenis dan Sumber Data	24
3.3	Teknik Analisis	24
3.4	Estimasi Regresi Data Panel.....	26
3.4.1	<i>Common Effect Model</i>	26
3.4.2	<i>Fixed Effect Model</i>	27
3.4.3	<i>Random Effect Model</i>	27
3.5	Uji Kesesuaian Model	28
3.5.1	<i>Uji Chow</i>	28
3.5.2	Uji Hausman.....	28
3.5.3	<i>Uji Lagrange Multiplier</i>	29
3.6	Pengujian Asumsi Klasik.....	29
3.6.1	Uji Normalitas.....	30
3.6.2	Uji Multikolinearitas	30
3.6.3	Uji Heterokedastisitas	31
3.6.4	Uji Autokorelasi	31
3.7	Pengujian Hipotesis.....	31
3.7.1	Uji-t	32
3.7.2	Uji F	32
3.7.3	Koefisien Determinasi (R²).....	33
3.8	Definisi Operasional Variabel.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Gambaran Umum Penelitian	35
4.1.1	Kondisi Geografis Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.....	35
4.1.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.....	37
4.1.3	Perkembangan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.....	40
4.1.4	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.....	44

4.2	Hasil Penelitian.....	47
4.2.1	Pemilihan Model Terbaik	47
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	49
4.2.3	Hasil Uji Regresi.....	51
4.2.4	Analisis Individu	53
4.2.5	Uji Statistik.....	58
4.3	Pembahasan	61
4.3.1	Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kemiskinan	61
4.3.2	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan.....	66
4.3.3	Komparasi Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		75
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77
DAFTAR LAMPIRAN		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022 (persen).....	3
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow.....	48
Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman	49
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Regresi FEM Provinsi Sumatera Selatan.....	51
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi FEM Provinsi Bengkulu	52
Tabel 4. 6 Hasil Individu Provinsi Sumatera Selatan.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Individu.....	56
Tabel 4. 8 Hasil Uji F	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji t	59
Tabel 4. 10 Hasil Koefisien Determinasi	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022 (Ribuan Rupiah)	5
Gambar 1. 2 Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022 (Ribuan Rupiah).....	6
Gambar 1. 3 Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022	8
Gambar 1. 4 Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022.....	9
Gambar 2. 1 Teori Lingkaran Kemiskinan menurut Nurkse	14
Gambar 2. 2 Kurva Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah.....	15
Gambar 2. 3 Kerangka pemikiran	21
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu....	36
Gambar 4. 2 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun...	37
Gambar 4. 3 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	38
Gambar 4. 4 Dana Bagi Hasil Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.....	40
Gambar 4. 5 Dana Bagi Hasil Kab/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022...	42
Gambar 4. 6 Dana Alokasi Khusus Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022	44
Gambar 4. 7 Dana Alokasi Khusus Kab/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	46
Gambar 4. 8 Hasil Uji Heterokedastisitas Provinsi Sumatera Selatan.....	50
Gambar 4. 9 Hasil Uji Heterokedastisitas Provinsi Bengkulu	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Asli DBH, DAK dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022	82
Lampiran 2 Data Logaritma Natural DBH, DAK dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022.....	85
Lampiran 3 Hasil Regresi Uji CEM Provinsi Sumatera Selatan.....	87
Lampiran 4 Hasil Regresi Uji FEM Provinsi Sumatera Selatan	87
Lampiran 5 Hasil Regresi Uji REM Provinsi Sumatera Selatan.....	88
Lampiran 6 Hasil Uji Chow Provinsi Sumatera Selatan.....	88
Lampiran 7 Hasil Uji Hausman Provinsi Sumatera Selatan	89
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Provinsi Sumatera Selatan.....	89
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas Provinsi Sumatera Selatan	89
Lampiran 10 Hasil Nilai Intersep Provinsi Sumatera Selatan.....	89
Lampiran 11 Data Asli DBH, DAK dan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	90
Lampiran 12 Data Logaritma Natural DBH, DAK dan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022	92
Lampiran 13 Hasil Regresi Uji CEM Provinsi Bengkulu	93
Lampiran 14 Hasil Regresi Uji FEM Provinsi Bengkulu	94
Lampiran 15 Hasil Regresi Uji REM Provinsi Bengkulu.....	94
Lampiran 16 Hasil Regresi Uji Chow Provinsi Bengkulu.....	95
Lampiran 17 Hasil Regresi Uji Hausman Provinsi Bengkulu	95
Lampiran 18 Hasil Regresi Uji Heteroskedastisitas Provinsi Bengkulu.....	95
Lampiran 19 Hasil Regresi Uji Multikolinearitas Provinsi Bengkulu.....	96
Lampiran 20 Hasil Nilai Intersep Provinsi Bengkulu	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghalangi kemajuan pembangunan. Salah satu tantangan yang signifikan adalah tingginya tingkat kemiskinan di sejumlah daerah. Sigit & Kosasih (2020) mendefinisikan kemiskinan sebagai tingkat standar hidup yang rendah yang ditandai dengan tingkat materi yang rendah dibandingkan dengan standar hidup yang umum di masyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang mendalam dan kompleks di Indonesia Dana *et al.*, (2019). Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan dan kemiskinan tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian serius Machfud *et al.*, (2021). Kemiskinan tidak terhindarkan karena adanya situasi tertentu yang memaksa, seperti krisis ekonomi. Selain itu, gaya hidup dan budaya juga dapat berkontribusi pada kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola dan mengurus kepentingan wilayah secara mandiri. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan

serta inisiatif sendiri, serta aspirasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat guna mewujudkan pemerataan dan keadilan di berbagai sektor (Aisah, 2022).

Sumatera Bagian Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, yang mencakup provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu memiliki basis ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam. Sumatera Selatan memiliki sumber daya alam di sektor energi, pertambangan, dan perkebunan skala besar, sedangkan Bengkulu lebih mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu sangat bergantung terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu menghadapi permasalahan serupa terutama dalam hal kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu memiliki tingkat kemiskinan yang hampir sama, meskipun pembangunan telah mengalami kemajuan di berbagai sektor angka kemiskinan pada dua provinsi ini tetap tinggi terutama di daerah pedalaman. Pada Provinsi Sumatera Selatan kemiskinan banyak ditemukan di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam utama dan tingkat kemiskinan menyentuh angka 12%. Provinsi Bengkulu mengalami tingkat

kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan banyak daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian yaitu di angka 14% di tahun 2022. Faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, rendahnya kualitas pendidikan dan lapangan kerja terbatas semakin memperparah kondisi ekonomi sebagian masyarakat (Putri, 2024).

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022 (persen)

Kab/Kota	Tahun	
	2021	2022
Kab. Lahat	16,46	15,61
Kab. Musi Banyuasin	15,84	15,19
Kab. Musi Rawas	13,89	13,34
Kab. Muara Enim	12,32	11,12
Kab. OKU	14,68	13,23
Kab. OKI	12,62	11,61
Kota Palembang	11,34	10,48
Kota Prabumulih	12,20	11,28
Kota Pagar Alam	9,40	8,47
Kota Lubuk Linggau	13,23	12,68
Kab. Banyuasin	10,75	10,00
Kab. Ogan Ilir	13,82	12,33
Kab. Oku Timur	10,60	10,05
Kab. Oku Selatan	11,12	10,56
Kab. Empat Lawang	13,35	12,03
Kab. Pali	12,91	11,76
Kab. Musi Rawas Utara	20,11	18,45
Kab. Bengkulu Selatan	18,16	17,86
Kab. Bengkulu Utara	11,61	11,48
Kab. Rejang Lebong	15,85	15,65
Kota Bengkulu	17,89	15,73
Kab. Kaur	18,62	18,10
Kab. Seluma	18,72	18,36
Kab. Mukomuko	11,93	11,44
Kab. Lebong	12,00	12,03
Kab. Kepahiang	14,83	14,53
Kab. Bengkulu Tengah	9,68	9,76

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

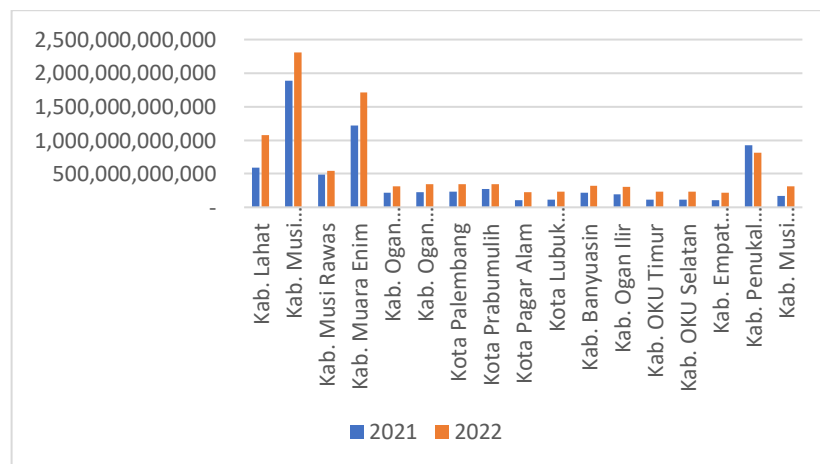
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu menunjukkan variasi yang signifikan antara kabupaten/kota,

dengan wilayah pedesaan atau terpencil cenderung memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Pada tahun 2022, Kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,45%, sementara di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Seluma memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 18,36%. Ketimpangan ini disebabkan oleh akses yang tidak merata, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang lebih terbatas di daerah pedesaan. Rendahnya diversifikasi ekonomi membuat pendapatan masyarakat bergantung pada sektor tertentu.

Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 8,47% dan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu mencatat tingkat kemiskinan terendah yaitu sebesar 9,76%. Peluang ekonomi yang lebih luas dan keberadaan sektor-sektor produktif memanfaatkan potensi pariwisata alamnya untuk menciptakan lapangan kerja, serta kedekatan geografis dengan pusat ekonomi yang lebih maju membuka peluang ekonomi lebih besar bagi warganya.

Penurunan kemiskinan yang konsisten di beberapa provinsi menjadi sinyal positif bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan memiliki dampak yang signifikan Kadafi & Murtala (2020). Namun, tetap diperlukan kebijakan yang lebih terarah, terutama di wilayah yang angka kemiskinannya masih tinggi. Dalam jangka panjang, upaya-upaya peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia (Manduapessy, 2020).

Desentralisasi memainkan peran penting dalam proses pembangunan daerah. Dengan adanya desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan kekayaan budaya dan tradisi lokal Muttaqin *et al.*, (2021). Setiap daerah memiliki kapasitas finansial yang berbeda untuk mendanai berbagai program sehingga menciptakan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk menangani hal ini, pemerintah mengalokasikan dana transfer dari APBN guna mendukung kebutuhan daerah dalam menjalankan desentralisasi. Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU RI No. 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan DBH Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu tahun 2021-2022 dalam ribu rupiah dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2.

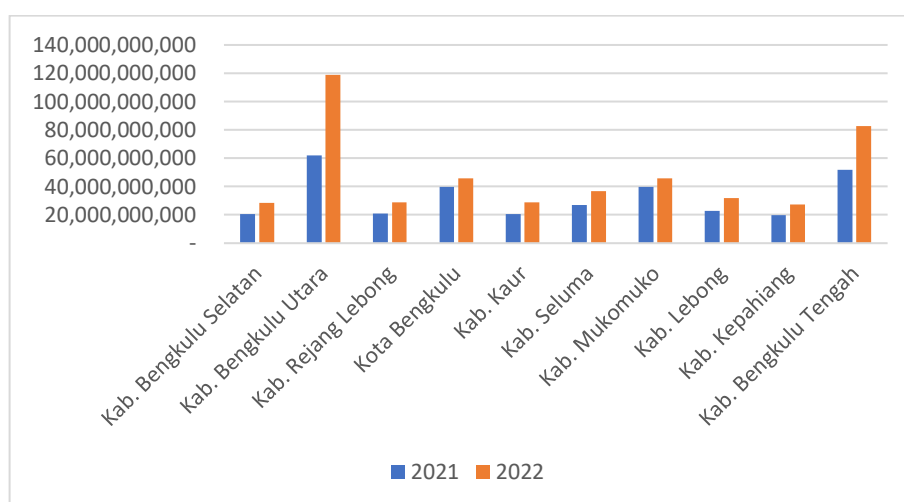


Gambar 1. 1 Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022 (Ribu Rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024

Gambar 1.1 menunjukkan adanya variasi yang signifikan pada DBH Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022. DBH tertinggi diterima oleh

Kabupaten Musi Banyuasin dan alokasi terendah diberikan kepada kota kecil seperti Kota Pagar Alam. Tingginya DBH di Musi Banyuasin disebabkan oleh kontribusi besar wilayah ini dalam sektor sumber daya alam, khususnya minyak dan gas bumi yang menjadi dasar utama perhitungan DBH. Daerah dengan sumber daya alam terbatas seperti Kota Pagar Alam, menerima alokasi DBH yang lebih kecil karena minimnya kontribusi terhadap pendapatan negara dari sektor pajak atau sumber daya alam.



Gambar 1. 2 Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022 (Ribu Rupiah)

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024

Gambar 1.2 menunjukkan DBH Provinsi Bengkulu tahun 2021-2022, Kabupaten Bengkulu Utara menerima alokasi tertinggi sebesar Rp62,07 miliar pada 2021 dan meningkat signifikan menjadi Rp118,83 miliar pada 2022. Kabupaten Kepahiang mencatat alokasi DBH terendah, yaitu Rp19,62 miliar pada 2021 dan meningkat menjadi Rp27,41 miliar pada 2022. Tingginya DBH di disebabkan oleh potensi sumber daya alam yang lebih besar yaitu hasil pertambangan dan perkebunan yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Kabupaten

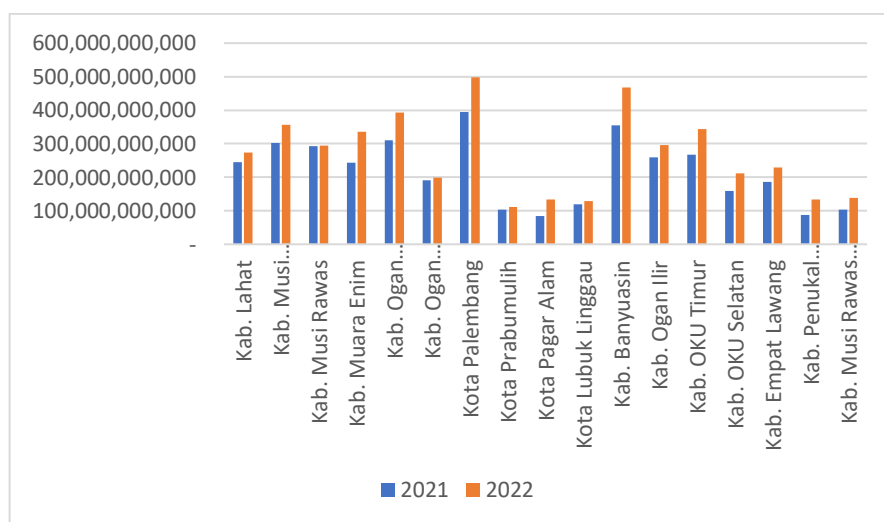
Kepahiang memiliki keterbatasan dalam potensi sumber daya alam sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan sumber daya alam relatif kecil.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketergantungan yang tinggi pada sektor sumber daya alam dalam menentukan alokasi DBH sehingga wilayah yang kurang kaya akan sumber daya cenderung tertinggal dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan menjadi lebih bergantung pada pendanaan lain, seperti DAU atau DAK. Rianto & Heryanto, (2023) menjelaskan bahwa ketimpangan ini memperbesar kesenjangan ekonomi antar daerah, mempersulit pemerataan pembangunan, dan menantang kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.

Mokorowu *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa perbedaan alokasi mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi dengan wilayah lain yang lebih berkembang dan ketimpangan ini justru memperbesar jurang ekonomi antar wilayah dan dapat memperlambat pembangunan di daerah dengan kontribusi rendah yang menerima DBH lebih kecil. Penelitian Suranto (2022) menyoroti perlunya peningkatan pembangunan ekonomi di kabupaten dengan alokasi rendah agar dapat mengurangi kesenjangan. Peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal di daerah-daerah dengan alokasi DBH yang rendah diperlukan agar mereka dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Selain menggunakan DBH, pengurangan kemiskinan juga dapat dilihat dari DAK, yaitu dana yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari

desentralisasi fiskal. Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung program-program pembangunan di daerah Arbila *et al.*, (2022). Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan pendanaan di tingkat daerah bergantung pada sejauh mana daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensi ekonominya, yang kemudian menciptakan sirkulasi dana bagi pembangunan berkelanjutan (Perkasa *et al.*, 2021). Perkembangan DAK pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu 2021-2022 dalam Ribu Rupiah dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan 1.4.

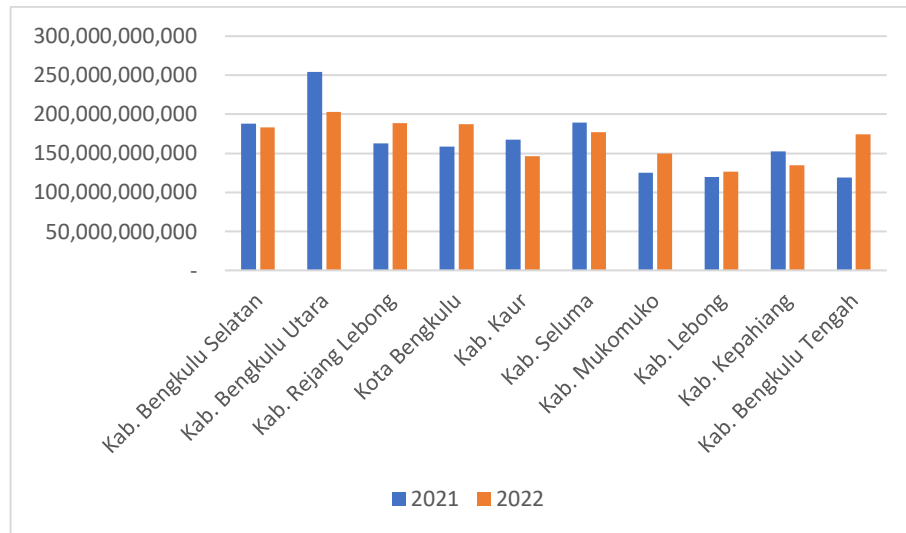


Gambar 1. 3 Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024

Berdasarkan data DAK Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021-2022, Kota Palembang menerima alokasi DAK tertinggi yaitu sebesar Rp498,71 miliar, sementara alokasi terendah diterima oleh Kota Pagar Alam sebesar Rp133,45 miliar. Alokasi tertinggi disebabkan oleh statusnya sebagai ibu kota provinsi dan pusat kegiatan sehingga membutuhkan anggaran besar untuk mendukung pembangunan

infrastruktur dan layanan publik strategis. Alokasi terendah di Kota Pagar Alam mencerminkan skala pembangunan yang lebih kecil dan fokus kebutuhan yang berbeda, karena wilayahnya lebih mengutamakan sektor pariwisata dan pertanian daripada infrastruktur berskala besar.



Gambar 1. 4 Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2022

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2024

Berdasarkan data DAK Provinsi Bengkulu tahun 2021-2022, DAK tertinggi di Provinsi Bengkulu diterima oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp254,30 miliar, sementara alokasi terendah diterima oleh Kabupaten Lebong sebesar Rp126,64 miliar. Alokasi tertinggi disebabkan oleh luas wilayah yang besar serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang beragam termasuk sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan. Kabupaten Lebong mencerminkan skala kebutuhan pembangunan yang lebih kecil, karena wilayah ini memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dan karakteristik ekonomi yang lebih terbatas.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa alokasi DAK didasarkan pada pertimbangan kebutuhan infrastruktur, populasi, dan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Fenomena DAK di Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, menunjukkan adanya ketimpangan antardaerah yang mencerminkan beragamnya kebutuhan pembangunan dan prioritas nasional. Namun, efektivitas penggunaan DAK tidak selalu optimal terutama di wilayah dengan alokasi besar, sementara daerah dengan alokasi kecil sering terkendala anggaran dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pola ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan pembangunan antara kawasan pusat ekonomi dan daerah yang sedang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih strategis agar DAK dapat secara efektif mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata.

Alokasi DAK dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan daerah dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan harapan dapat mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia Ramadhina & Syafitri (2024). Peningkatan alokasi pada daerah tertentu menunjukkan fokus untuk mempercepat pembangunan, sedangkan penurunan alokasi di wilayah lain disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan infrastruktur. DAK diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat daya saing daerah (Marheni & Triyanto, 2023). Penelitian (Fitriyanti & Handayani, 2020) menjelaskan bahwa semakin tinggi DAK, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan dapat mengurangi kemiskinan.

Upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Ketimpangan pembangunan terutama di wilayah terpencil menyebabkan perbedaan kesejahteraan yang mencolok antar kabupaten/kota sehingga banyak masyarakat miskin kesulitan keluar dari jerat kemiskinan. Safitri *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa Program-program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya efektif, terutama di daerah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana kontribusi DBH dan DAK dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai tulisan berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan: Komparasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan: Komparasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu menganalisis pengaruh dana bagi hasil dan dana alokasi khusus terhadap kemiskinan: komparasi Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan Analisa tentang Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan khususnya di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu sehingga dapat digunakan untuk bahan membaca, referensi peneliti lain dan perbandingan untuk melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi lembaga-lembaga terkait dalam memutuskan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai bahan evaluasi terhadap program-program yang telah berjalan sehingga alokasi dana dapat lebih dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman*, 2(2), 102–110. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>
- Aisah, N. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh, Papua Dan Papua Barat Tahun 2010-2020. *Universitas Sriwijaya*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Alvaro, R., & Zahara, E. L. (2022). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 4(2), 106–124. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v4i2.77>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11, 48–54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Awaludin, M. G., & Wibowo, P. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dan PDRB Daerah Tertinggal. *Jurnalku*, 3(4), 445–469. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i4.645>
- Badan Pusat Statistik Bengkulu. (2024). Penduduk Miskin Tahun 2018-2022.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (2024). Penduduk Miskin Tahun 2018-2022.
- Dana, A., Rhokayyah, S., & Widyanti, R. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Pada Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2015-2019*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Alokasi dan Realisasi TKD. Kementerian Keuangan, Jakarta
- Elisabeth, P., & Sugiyanto, F. (2021). Analisis Pengaruh Defisit Anggaran, Belanja Pemerintah Pusat, dan Utang Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2019. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(3), 184–207.
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 79–90. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Ghozali, I. (2018). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS*” Edisi Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Gifelem, M., Masinambow, V. A. ., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 25–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/49671>
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Iskandar, F. A., & Bayu Bawono, A. D. (2023). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi*. 07(02), 1–8.
- Islami, B. K., & Nababan, B. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor 2010-2016. *Jurismata*, 2(1), 2656–2692.
- Izzati, A. N., & Indrawati, L. R. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang. *Paradigma Multidisipliner*.
- Kadafi, M., & Murtala, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(2), 23. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>
- Kadir, A. R., Dwiana, N., & Saudi, S. (2023). *Analysis of the Influence of Village Funds , Village Allocation of Funds , Revenue Sharing Funds on Economic Growth in East Luwu District*. 11(2), 58–65.
- Kusuma, A. (2021). *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Mamoto, C., Rotinsulu, T. O., & Tolosang, K. D. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Raya Tahun 2015-2018. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 33–44.
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4(2), 39–57.

- Mardiansyah, Ahmad, A. A., & Suharno. (2023). The Influence Of General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, And Village Funds On Poverty In The Special Region Of Yogyakarta Province. *Proceeding of Midyear International Conference*, 2(January), 182–196.
- Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333–342. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(04), 81–94.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Nany, M., Pratama, D. B., Prasetyaningrum, M., & Kusumaningsih, A. U. (2022). Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 22(3), 247–261. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/8274%0Ahttps://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/download/8274/4938>
- Nugroho, H. B. (2022). *Analisis Determinan Kemiskinan : Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia*. 7–16.
- Nur Izzati, A., & Indrawati, L. R. (2021). Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Magelang Analysis Of The Effect Of Local Own Income And Revenue Sharing Funds On Poverty Levels In Magelang City. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(4), 333–340.
- Nurul Arbila, Yani Rizal, & Iskandar Iskandar. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 240–249. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.741>
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rumat, V. A. (2019). Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Di Kota Bitung. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado ABSTRAK*, 1–10.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015–2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>

- Perkasa, L. S. P., Kawung, G. M. V, Tumangkeng, S. Y. L., Pengaruh, A., Alokasi, D., Dan, U., Alokasi, D., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 503–514.
- Putri, K. A. (2024). Kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pengaruh Belanja Modal Daerah, Dana Kemiskinan di Sumbagsel Tahun 2018-2022.
- Ramadhina, S., & Syafitri, W. (2024). Pengaruh Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan PDRB terhadap Kemiskinan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(2), 438–454.
- Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinand di Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(2), 1. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019>
- Rianto, & Heryanto. (2023). Pengaruh Capital Expenditur, Special Allocation Fund, General Allocation Fund and Level of Regional Financial Independence. *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 47–57.
- Rustiana Marheni, & Eko Triyanto. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(11), 4223–4240. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i11.6130>
- Safitri, I., Hasibuan, B. K., & Silalahi, A. S. (2020). *The Effect Of Regional Original Income, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, And Fund For The Results Of The District Capital Expenditure Allocation And North Sumatra Province City*. 2010–2019.
- Samosir, M. S., Paddu, A. H., Agussalim, & Sabir. (2024). *The Impact of Fiscal Decentralization on Poverty in the Nine Provinces of Eastern Indonesia which are above National Poverty for the 2006–2022 Period* (Issue Icame). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-400-6_22
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Suharto, S., & Aini, F. N. (2024). Analisis pengaruh dana keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 24–32. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss1.art4>
- Suranto. (2022). Pengaruh Dana Perimbangan (Dbh, Dau, & Dak) Terhadap Produk

- Domestik Regional Bruto (Pdrb) Sulawesi Selatan. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 53–67. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.348>
- Tengah, K. A. (2020). *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*. 2(1), 1–15.
- Tony Putra, Sayifullah Sayifullah, & Rizal Syaifudin. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 240–258. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i4.1413>
- Tschudin, V. (2007). Poverty and human development. *Nursing Ethics*, 14(6), 711–712. <https://doi.org/10.1177/0969733007082110>
- Widyasari, N. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–16.
- Zahari, Ms. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>